

## **PARTISIPASI PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN KONSERVASI DI TAMAN WISATA ALAM GUNUNG TANGKUBAN PERAHU**

*(Participation of Business Actors in Conservation Activity at Gunung Tangkuban Perahu  
Nature Tourism Park)*

SITI HASANAH<sup>1)</sup>, ARZYANA SUNKAR<sup>2)</sup>, DAN METI EKAYANI<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.  
Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga, Kecamatan Dramaga, Bogor, Kode Pos 16680

<sup>2)</sup>Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor  
Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga, Kecamatan Dramaga, Bogor, Kode Pos 16680

<sup>3)</sup>Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.  
Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga, Kecamatan Dramaga, Bogor, Kode Pos 16680

Email : E-mail : sitihasanah3196@gmail.com

**Diterima 30 September 2019 / Disetujui 26 Desember 2019**

### **ABSTRACT**

*Participation of community as business actors in Gunung Tangkuban Perahu Nature Tourism Park (GTPNTP) is a key to sustainable management of conservation areas through conservation activities. Conservation activities in GTPNTP have not been maximized, so needs to support by various stakeholders. This study aims to determine the level of participation of business actors in conservation activities in GTPNTP by studying economic benefits obtained by business actors from tourism activities through their willingness to contribute for conservation activities and their willingness to pay for conservation funds. The methods used were observation, questionnaire, interview, and literature study. Respondent amount of 58 business actors using stratified random sampling technique. The results showed that in general, business actors get economic benefits from tourism revenues with a high contribution to the share (78,59%) and very high to the covering (120,46%). Most of the participation levels of business actors included in the very low category by 88,33% and the low category by 11,67%. In general, business actors have contributed to conservation activities in GTPNTP and 60% are willing to pay for conservation funds. This study shows that the willingness of business actors to contribute for conservation activities is quite high.*

*Keywords: business actors, conservation activities, economic benefits, Gunung Tangkuban Perahu Nature Tourist Park, participation*

### **ABSTRAK**

*Partisipasi masyarakat selaku pelaku usaha di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu (TWAGTP) merupakan kunci pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan melalui kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi di TWAGTP belum maksimal sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Penelitian bertujuan menentukan tingkat partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan konservasi di TWAGTP dengan mengkaji manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku usaha dari kegiatan wisata dan kesediaannya berkontribusi dalam kegiatan konservasi maupun membayar dana konservasi. Metode yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Responden berjumlah 58 pelaku usaha dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaku usaha mendapatkan manfaat ekonomi dari pendapatan wisata dengan kontribusi tinggi pada share (78,59%) dan sangat tinggi pada covering (120,46%). Sebagian besar tingkat partisipasi pelaku usaha masuk ke dalam kategori sangat rendah sebesar 88,33% dan kategori rendah sebesar 11,67%. Secara umum pelaku usaha sudah berkontribusi dalam kegiatan konservasi di TWAGTP dan sebanyak 60% yang bersedia membayar dana konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan pelaku usaha berkontribusi dalam kegiatan konservasi cukup tinggi.*

*Kata kunci: pelaku usaha, kegiatan konservasi, manfaat ekonomi, Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu, partisipasi*

### **PENDAHULUAN**

Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kegiatan pemanfaatan inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi fungsi ekonomi dan ekologi di TWA, karena kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan (Hijrianti dan Mardiana 2014). Disisi lain, TWA juga memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman hayati dan keunikan alam (PHPA 1996). Salah satu bentuk pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak bersifat eksploitatif adalah pemanfaatan untuk wisata alam (Halim 2016). Sejalan dengan pendapat Ernawati (2010) dan Supriatna (2014), bahwa tren pasar wisata alam menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan dengan yang tertinggi adalah jumlah kunjungan ke Taman Wisata Alam (KLHK 2016). Taman Wisata Alam (TWA) di Indonesia yang merupakan destinasi yang paling diminati di Provinsi Jawa Barat adalah TWA Gunung Tangkuban Perahu (TWAGTP). TWAGTP merupakan TWA dengan

predikat platinum dari penerimaan PNPB terbanyak dan menempati posisi kedua sebagai penerima wisatawan mancanegara terbanyak dari seluruh kawasan konservasi se-Indonesia (Dirjen KSDAE 2018). Pengembangan wisata alam di kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan berupa manfaat ekonomi seperti pendapatan dari unit usaha dan penyerapan tenaga kerja lokal tanpa mengganggu ekologis kawasan tersebut (Aryunda 2011; Ekayani dan Nuva 2012; Ekayani *et al.* 2014; Martina 2014). Disisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan biasanya diikuti dengan penurunan kualitas kondisi ekologisnya (Suparmoko 2008), karena berhubungan dengan aktivitas manusia (Kalantari dan Asadi 2010). Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mempertahankan keberlanjutan kawasan TWAGTP.

Wisata alam dapat menjadi alat manajemen kawasan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata (Rais *et al.* 2007). Masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata di TWAGTP adalah pelaku usaha. Jika pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dari keterlibatan dalam wisata alam, maka diharapkan mereka akan ikut menjaga kelestarian sumberdaya alam tersebut. Partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai profesi dalam usaha wisata alam diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan rumah tangga serta mengurangi ketergantungan masyarakat dalam mengekstraksi kawasan hutan (Tiga *et al.* 2019).

Partisipasi pelaku usaha dalam melestarikan kawasan salah satunya berkontribusi dalam kegiatan konservasi di TWAGTP. Kegiatan konservasi yang dilakukan masyarakat (pelaku usaha) diduga akan berkelanjutan, karena mereka telah lama menetap di sekitar kawasan. Lamanya masyarakat menetap di suatu kawasan membuat mereka lebih memahami dan mengerti sejarah kawasan, sehingga mereka dapat menjelaskan dengan baik mengenai kawasannya (Smith dan Robinson 2006). Secara tidak langsung partisipasi masyarakat di kawasan konservasi dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan yang ditempatinya, dengan begitu mereka akan lebih bertanggung jawab dalam melestarikan kawasannya (Smith dan Robinson 2006; Pasape *et al.* 2013). Partisipasi pelaku usaha terhadap kawasan dengan skenario pembayaran jasa lingkungan berupa iuran dana konservasi. Dengan adanya iuran dana konservasi dapat memberikan nilai tambah pada kawasan konservasi berupa manfaat ekonomi tanpa mengganggu

kelestarian kawasan tersebut karena pemanfaatan ini tidak bersifat ekstraktif (Suprayitno 2008). Keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat dapat memotivasi masyarakat untuk bersedia melestarikan serta menggunakan sumberdaya alam yang ada di daerahnya secara berkelanjutan (Mogaka *et al.* 2001). Oleh sebab itu penelitian ini perlu dilakukan untuk menentukan tingkat partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan konservasi di TWAGTP dengan mengkaji manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku usaha dari kegiatan wisata dan kesediaannya berkontribusi dalam kegiatan konservasi maupun membayar dana konservasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018 dan dilanjutkan pada bulan Mei 2019 di TWAGTP, Bandung Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari Studi S1 dan S2 yang saling berhubungan. Responden terdiri dari pelaku usaha komoditas (kios dan asong berupa makanan maupun souvenir di daerah Kawah Ratu dan Terminal Jayagiri) dan pelaku usaha jasa (joki kuda tunggang, foto cetak, *guide* dan penjaga toilet). Responden dipilih dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Teknik ini membagi populasi ke dalam strata-strata yang akhirnya menjadi sub-sub populasi, kemudian pengambilan sampel dilakukan dalam setiap stratum secara acak (Babbie 2010). Responden di stratifikasi berdasarkan tipe pelaku usaha, karena berhubungan dengan pekerjaan utamanya. Jatmiko (2017) menyatakan bahwa variabel pekerjaan memberikan pengaruh terhadap intensitas partisipasi dalam suatu kegiatan. Responden sebanyak 58 dipilih dengan pertimbangan sudah mewakili setiap kelompok pelaku usaha di TWAGTP.

Manfaat ekonomi dianalisis menggunakan *share* dan *covering*. *Share* merupakan kontribusi pendapatan wisata terhadap pendapatan total rumah tangga (Sundari *et al.* 2012). *Covering* terhadap pengeluaran rumah tangga adalah kontribusi wisata dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga pemilik usaha dan tenaga kerja (Fadilah 2016). Berikut adalah kategori *share* dan *covering* menurut Sundari *et al.* (2012) yang tersaji pada Tabel 1.

Tingkat partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan konservasi dianalisis dari hasil data kuesioner dan dilakukan penilaian skala likert menggunakan rumus *three box method* dengan persamaan 3 (Riduwan 2009) yang digolongkan berdasarkan kategori pada Tabel 2.

Tabel 1 Kategori *share* dan *covering*.

Kategori	Persentase
Sangat rendah	<25%
Rendah	25%-49%
Tinggi	50%-75%
Sangat tinggi	>75%

Tabel 2 Penilaian tingkat partisipasi

Kategori	Skor
Sangat rendah	0-18
Rendah	19-36
Tinggi	37-54
Sangat tinggi	55-72

Analisis *Willingness To Pay* (WTP) dilakukan untuk menentukan dana konservasi yang dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai salah satu kontribusi dalam pelestarian kawasan dengan metode *bidding game*. Metode ini dilakukan dengan menawarkan dana konservasi secara bertahap hingga mendapatkan nilai WTP maksimal. Metode ini dipilih agar nilai WTP yang diberikan pelaku usaha diperoleh semaksimal mungkin sehingga dapat dijadikan acuan penentuan dana konservasi untuk upaya pelestarian kawasan TWAGP. Penawaran tarif dana konservasi dimulai dari nilai *starting point* Rp 220.000,00 perorang dan interval Rp 20.000,00. Penentuan nilai *starting point* dan interval berdasarkan informasi dari PT. GRPP dan mengacu pada kesanggupan pelaku usaha membayar lisensi Rp. 200.000,00/tahun untuk keberlanjutan usahanya. Selanjutnya dugaan rata-rata WTP dihitung dengan rumus (Fauzi 2014) :

$$EWTP = \dots\dots\dots \sum_{i=1}^n \frac{WTP_{xi}}{n}$$

Keterangan:

EWTP : dugaan nilai rata-rata WTP (Rp)

WTP xi : nilai WTP ke-i

N : Jumlah responden

I : Responden ke-I yang bersedia membayar (1,2,3,...,n)

Data kesiediaan pelaku usaha berpartisipasi dalam kegiatan konservasi di TWAGTP diperoleh melalui kuesioner kepada pelaku usaha dan wawancara kepada pengelola sebagai data tambahan. Penilaian tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan disajikan ke dalam bentuk tabulasi berupa persentase

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Manfaat Ekonomi Pelaku Usaha di TWA Gunung Tangkuban Perahu (TWAGTP)

Manfaat ekonomi pelaku usaha di TWAGTP dapat diestimasi melalui *share* pendapatan wisata terhadap total pendapatan pelaku usaha dan *covering* pendapatan wisata terhadap pengeluaran rumah tangga (Tabel 3 dan Tabel 4).

#### a. Share pendapatan wisata terhadap pendapatan total pelaku usaha

*Share* wisata terhadap pendapatan total rata-rata pelaku usaha di TWAGTP menunjukkan kontribusi tinggi sebesar 70,69% (Tabel 3). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan dari kegiatan wisata sudah menjadi bagian penting dari pendapatan rumah tangga (Istiqomah *et al.* 2019).

Jenis usaha yang memiliki persentase *share* tertinggi adalah usaha komoditas (82,46%). Sesuai dengan Tabel 3 bahwa rata-rata manfaat ekonomi yang diterima pelaku usaha sangat tinggi yaitu melebihi 75%. Pelaku usaha (PU) jasa manfaat ekonominya tinggi sedangkan PU komoditas hasilnya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan wisata menjadi sumber pendapatan utama dimana pendapatan terbesar dari seluruh jenis pendapatan rumah tangga tersebut (Hasanah 2018). *Share* wisata sangat tinggi berhubungan dengan jumlah kunjungan wisatawan TWAGTP yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan bahwa kunjungan wisata rata-rata sebanyak 51.858 orang/hari pada Tahun 2016. Oleh sebab itu, TWAGTP merupakan TWA dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi se-Nasional dalam delapan tahun terakhir hingga saat ini (PT. GRPP 2017). Hal tersebut berdampak pada pendapatan para pelaku usaha karena banyak wisatawan yang membelanjakan uangnya di kawasan TWAGTP. Sejalan dengan pendapat Yoeti (2008) bahwa keberhasilan pengembangan wisata di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya pengaruh uang yang dibelanjakan wisatawan terhadap perekonomian lokal.

Berdasarkan hasil estimasi *share* pendapatan, dapat dikatakan bahwa masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan wisata telah mendapatkan manfaat (*benefit sharing*). *Benefit sharing* yang telah diterima oleh pelaku usaha berdampak pada konservasi dalam arti luas, yakni masyarakat akan menjaga atau tidak merusak ataupun mengesktraksi sumber daya alam yang merupakan modal utama dari kegiatan wisata alam (Istiqomah *et al.* 2019). Hal ini ditunjukkan dari perilaku pelaku usaha yang mentaati aturan yang berlaku seperti tidak membuang sampah sembarangan serta tidak melakukan perburuan maupun tidak mengeksploitasi sumber daya alam di TWAGTP. Perilaku peduli terhadap kawasan ini berhubungan dengan mafaat ekonomi yang sudah mereka dapatkan dari kegiatan wisata. Adanya manfaat ekonomi yang telah diperoleh masyarakat mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pelestarian kawasan (Istiqomah *et al.* 2019). Sesuai dengan pernyataan tersebut, diharapkan pelaku usaha yang mendapatkan manfaat ekonomi tinggi bersedia untuk lebih peduli kawasan terutama pada aspek konservasi.

#### b. Covering pendapatan wisata terhadap pengeluaran rumah tangga

Hasil penelitian menunjukkan *covering* rata-rata pelaku usaha di TWAGTP menunjukkan hasil sangat tinggi sebesar 120,46% (Tabel 4). Jenis usaha yang memiliki persentase *covering* lebih tinggi adalah usaha komoditas (152,15%). Hasil *covering* pelaku usaha tersaji pada Tabel 4.

Tabel 3 *Share* pendapatan wisata terhadap pendapatan total pelaku usaha

Responden	Pendapatan wisata rata-rata perbulan (Rp)	Pendapatan rata-rata total perbulan (Rp)	<i>Share</i> wisata terhadap pendapatan total rata-rata (%)	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d) = (b)/(c)*100	
Usaha jasa	3.320.000	4.443.333	74,72	Tinggi
Usaha komoditas	7.428.000	9.008.000	82,46	Sangat tinggi
Rata-rata	5.374.000	6.725.666	78,59	Sangat tinggi

Tabel 4 *Covering* pendapatan wisata terhadap pengeluaran rumah tangga pelaku usaha.

Responden	Pendapatan wisata rata-rata perbulan (Rp)	Pengeluaran rata-rata total perbulan (Rp)	<i>Covering</i> pendapatan wisata Terhadap pengeluaran RT (%)	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d) = (b)/(c)*100	
Usaha jasa	3.320.000	3.739.933	88,77	Sangat tinggi
Usaha komoditas	7.428.000	4.881.900	152,15	Sangat tinggi
Rata-rata	5.374.000	4.310.917	120,46	Sangat tinggi

Tabel 4 menunjukkan nilai *covering* pelaku usaha jasa sangat tinggi dengan kata lain pendapatan dari wisata dapat memenuhi seluruh pengeluaran rumah tangga. Meskipun manfaat ekonomi yang didapatkan cukup tinggi namun tidak sepenuhnya pengeluaran pelaku usaha dapat terpenuhi dari pendapatan wisata saja, terutama para pelaku usaha jasa. Pelaku usaha jasa tidak setiap hari bekerja di TWAGTP, sehingga beberapa dari mereka memiliki usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

*Covering* pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi sangat tinggi juga diperoleh oleh pelaku usaha komoditas sebesar 152,15%. Tingginya nilai *covering* dipengaruhi oleh pendapatan yang dihasilkan dari sektor wisata rata-rata sebesar Rp 5.374.000/bulan karena sebagian besar anggota keluarga pelaku usaha komoditas membuka usaha di TWAGTP, sehingga pendapatan dari sektor wisata dapat mencukupi kebutuhan mereka. Kebutuhan rumah tangga dalam penelitian ini merupakan pengeluaran rutin yang dikeluarkan setiap bulannya mencakup konsumsi pangan, air, uang saku dan pendidikan anak, listrik, transportasi, pulsa dan lain-lain. Harga barang di dalam kawasan TWAGTP cukup tinggi untuk para wisatawan, sedangkan harga untuk masyarakat sekitar tidak terlalu tinggi, bahkan kebutuhan untuk pangan berasal dari perkebunan masyarakat desa dan kebutuhan lainnya masih bisa dipenuhi dari pasar lokal.

Selain itu, pengeluaran RT tidak terlalu tinggi dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp 4.310.917 dibandingkan dengan pendapatannya dengan rata-rata Rp 5.374.000. Selain itu, biaya hidup di sekitar TWAGTP tidak begitu tinggi sekitar Rp 2.000.000 - Rp

3.000.000/bulan terutama di Desa Cikole yang dekat dengan kawasan. Pendapatan wisata pelaku usaha komoditas digunakan untuk memenuhi modal usaha dan sisanya ditabung. Hal ini sesuai dengan pendapat Satria (2017) yang menyatakan kelebihan dari pendapatan biasanya di tabung. Manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku usaha diharapkan dapat memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam kegiatan pelestarian kawasan. Salah satu bentuk kontribusi pelaku usaha terhadap konservasi ditunjukkan dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan konservasi.

## 2. Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha dalam Kegiatan Konservasi

Kegiatan konservasi yang sudah dilakukan PT. GRPP di TWAGTP diantaranya OPSIH (Operasi Bersih), pemantauan jasa lingkungan, restorasi, pemantauan flora fauna serta edukasi lingkungan pada anak usia dini. Sebagian besar pelaku usaha hanya berkontribusi dalam kegiatan OPSIH. Menurut staff konservasi PT. GRPP, PT. GRPP masih terfokus pada pengelolaan dan pengembangan wisata oleh sebab itu kegiatan konservasi belum banyak dikembangkan. Disisi lain, adanya keinginan dari pelaku usaha untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan konservasi (Hasanah 2018).

Partisipasi pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan kawasan maupun wisata yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Narsuka dan Sujali (2009) bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama terhadap keberhasilan penerapan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan serta pelestarian kawasan konservasi. Tingkat partisipasi pelaku usaha dibatasi pada kegiatan menjaga kebersihan dan keindahan

kawasan, menjaga keamanan dan keutuhan kawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di TWAGTP.

Tingkat partisipasi pelaku usaha masuk ke dalam kategori sangat rendah dan rendah dalam kegiatan konservasi secara keseluruhan (Gambar 1). Disisi lain, sudah ada upaya yang dilakukan pelaku usaha terhadap konservasi di antaranya menjaga kebersihan dan keindahan kawasan serta menjaga keamanan kawasan, meskipun kontribusinya masih cenderung rendah. Tingkat partisipasi pelaku usaha rendah salah satu penyebabnya karena mereka lebih fokus untuk berdagang. Mereka berdagang hampir 7-10 jam/hari, oleh sebab itu tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan lain. Intensitas partisipasi bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang terhitung menyita waktu membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata (Munawaroh 2017).

Pelaku usaha (PU) komoditas cenderung lebih rendah partisipasinya dibandingkan PU jasa karena PU komoditas lebih terfokus melayani banyaknya wisatawan yang berkunjung. Selain itu, karena rendahnya gangguan kawasan di TWAGTP yang semakin berkurang dari tahun ke tahunnya (PT. GRPP 2017) membuat pelaku usaha tidak banyak partisipasi terhadap kawasan.

Saat ini, kegiatan konservasi yang sudah dilakukan pelaku usaha sebagian besar adalah menjaga kebersihan dan keindahan kawasan. Menurut Hijrianti dan Mardiana (2014), masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya alam dan lingkungan akan senantiasa menjaganya. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa dengan menjaga lingkungan mereka akan menerima manfaat yang baik pula dari lingkungan (Hijrianti dan Mardiana 2014).

Pelaku usaha secara sadar maupun tidak sadar sudah berkontribusi dalam kegiatan konservasi, meskipun kontribusinya belum maksimal. Seiring berjalannya waktu dan adanya manfaat ekonomi yang penting bagi keberlanjutan mereka, maka mereka akan termotivasi untuk turut menjaga kelestarian kawasan demi keberlangsungan penerimaan mereka dari kegiatan wisata alam, yang mutlak mengharuskan adanya keindahan dan kelestarian SDAL (Istiqomah *et al.* 2019). Hal ini sesuai dengan konsep pembayaran jasa lingkungan atau *Payment for Environmental Services/PES* (Engel *et al.* 2004; Ekayani *et al.* 2014). Dalam konsep pembayaran jasa lingkungan wisata alam, TWAGTP sebagai pemberi jasa ekosistem mendapat pembayaran dari pelaku usaha sebagai pemanfaat kelestarian dan keindahan kawasan TWAGTP tersebut. Pendapatan dari wisata alam selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, juga dapat memberikan kontribusi dana bagi konservasi tersebut (Lindberg 1991; Ekayani dan Nuva 2012).

### **3. Kesiediaan Pelaku Usaha Pelaku Usaha Membayar Dana Konservasi melalui *Willingness To Pay* (WTP)**

Kontribusi pelaku usaha dalam kegiatan konservasi melalui perhitungan *Willingness to Pay* (WTP) berupa

dana konservasi. Ekosistem TWAGTP berfungsi sebagai penyedia jasa wisata alam dan sudah semestinya mendapat manfaat dari kegiatan wisata alam tersebut (Ekayani *et al.* 2014). Secara umum pelaku usaha yang bersedia membayar dana konservasi sebanyak 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku usaha memahami pentingnya kelestarian kawasan untuk keberlanjutan wisata alam di TWAGTP. Nilai WTP dana konservasi pelaku usaha di TWAGTP dapat dilihat pada Tabel 5.

Sebanyak 40% pelaku usaha tidak bersedia membayar dana konservasi karena beberapa alasan, salah satunya karena pendapatan dari kegiatan wisata tidak stabil. Jatmiko (2017) menyatakan bahwa masyarakat dengan pendapatan menengah atau rendah cenderung memilih hadir dalam pertemuan, memberikan ide/kritik dan saran, ataupun memberi solusi dan cenderung akan berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaganya karena secara finansial mereka menganggap dirinya kurang mampu. Pendapatan yang tidak stabil diduga berhubungan dengan jumlah kunjungan dan uang yang dibelanjakan para wisatawan di kawasan TWAGTP. Menurut Yoeti (2008), keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu daerah dapat dihitung dari besarnya pengaruh uang yang dibelanjakan wisatawan terhadap perekonomian lokal masyarakat sekitar. Jika daya beli wisatawan di TWAGTP rendah maka berdampak pada penghasilan pelaku usaha yang rendah begitupun sebaliknya. Alasan lain pelaku usaha merasa keberatan membayar dana konservasi karena mereka harus membayar iuran rutin kepada PT. GRPP berupa pembayaran lisensi, fasilitas di kawasan seperti biaya parkir, kebersihan dan lain-lain setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Tabel 5 didapat rata-rata WTP sebesar Rp. 217.714,00. Jika pengelola TWAGTP akan menetapkan dana konservasi, maka nilai rata-rata tersebut dapat dibulatkan menjadi Rp200.000,00/tahun untuk mempermudah dalam proses pembayaran dana konservasi yang akan dibayarkan setiap setahun sekali.

Pengelolaan TWAGTP dibawah tanggung jawab BBKSDA Jawa Barat, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga (PT. GRPP). Oleh sebab itu, PT. GRPP sebagai pengelola TWAGTP berkewajiban membayar pajak IUPA sebesar 10% dari laba bersih perusahaan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Setiap pelaku usaha harus mendapatkan izin usaha di kawasan wisata. Menurut Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA, izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. Hal ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam. Pemberian IUPJWA perorangan diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan, termasuk masyarakat setempat harus mendapatkan izin usaha di kawasan wisata dan membayar lisensi sebesar Rp 200.000,- setiap

tahunnya untuk izin usaha wisata di TWAGTP. Disisi lain pelaku usaha perlu membayar biaya parkir sebesar Rp 300.000/orang untuk kendaraan roda dua dan Rp 500.000/orang untuk kendaraan roda empat selama satu tahun. Biaya lisensi dan di luar biaya lisensi yang harus dibayar setiap tahun tersebut membuat beberapa dari pelaku usaha merasa keberatan dalam membayar dana konservasi. Oleh sebab itu, pelaku usaha lebih memilih berkontribusi dalam bentuk tenaga dan waktu dalam konservasi dibandingkan harus membayar dana konservasi. Saat ini, pelaku usaha belum berkontribusi dalam dana konservasi, karena pajak kawasan ditanggung oleh PT. GRPP dan izin usaha di kawasan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. PNBP seluruhnya berasal dari tiket kunjungan wisatawan sebesar Rp 50.000,00/orang saat hari biasa dan RP. 7.500,00/orang pada hari libur. PNBP tersebut langsung disetorkan setiap minggunya ke BBKSDA Jawa Barat dan diteruskan ke Pusat Kas Negara Kementerian Keuangan.

Berdasarkan beberapa tingkatan WTP responden pelaku usaha terhadap dana konservasi, maka diestimasi penerimaan berdasarkan beberapa skema pemberlakuan iuran dana konservasi untuk kegiatan konservasi di TWAGTP. Diestimasi juga jika tidak menerapkan dana konservasi seperti terdapat pada Tabel 6.

Nilai penerimaan yang cukup besar ini kedepannya akan dijadikan sumber dana bagi PT. GRPP untuk pelaksanaan kegiatan konservasi di TWA Gunung Tangkuban Perahu. Sejalan dengan Suprayitno (2008) bahwa penerimaan dari pengembangan wisata alam dapat dialokasikan oleh pengelola untuk konservasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengelola dapat menjalankan kegiatan konservasi yang belum dilaksanakan maupun menciptakan program baru dalam aspek konservasi. Hasil dari iuran dana konservasi diharapkan dapat dikelola dengan baik dan bijaksana oleh pengelola untuk mewujudkan kawasan yang berkelanjutan serta mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan TWAGTP.



Gambar 1 Tingkat partisipasi pelaku usaha jasa dan komoditas dalam kegiatan konservasi di TWAGTP

Tabel 5 WTP dana konservasi pelaku usaha di TWAGTP.

WTP (Rp)	Jumlah Responden	%	EWTP (Rp)
(a)	(b)	(c = b : e x 100)	(d= a x b : e)
120.000	4	11,43	1.3714
200.000	2	5,71	1.1429
220.000	12	34,29	7.5429
240.000	16	45,71	10.9714
260.000	1	2,86	7.429
Total	35	100	217.714

Tabel 6 Estimasi penerimaan dana konservasi TWAGTP sesuai WTP pelaku usaha

EWTP (Rp)	% Pelaku Usaha	Penerimaan (Rp)
(a)	(b)	(c = b x N x a)
120.000	100	1.200.000.000
200.000	5,71	40.000.000
220.000	34,29	264.000.000
240.000	45,71	384.000.000
260.000	2,86	26.000.000

## SIMPULAN

Manfaat ekonomi dari pendapatan wisata di TWA Gunung Tangkuban Perahu (TWAGTP) secara keseluruhan termasuk ke dalam kontribusi tinggi pada *share* (78,59%) dan sangat tinggi pada *covering* (120,46%). Sebagian besar tingkat partisipasi pelaku usaha masuk ke dalam kategori sangat rendah sebesar 88,33% dan kategori rendah sebesar 11,67%. Secara umum pelaku usaha sudah melakukan kegiatan konservasi di TWAGTP namun belum optimal. Sebanyak 60% pelaku usaha bersedia membayar dana konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pelaku usaha dalam kegiatan konservasi cukup tinggi dan kedepannya harus terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryunda H. 2011. Dampak ekonomi pengembangan kawasan ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 22(1):1-16.
- Babbie E. 2010. *The Practice of Social Research 12th Edition*. Wadsworth (USA): Cengage Learning
- [Dirjen KSDAE] Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2018*. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ekayani M, Nuva. 2012. *Could Ex-Situ Conservation Play Effective Role to Bridge Ecotourism and Biodiversity? Case of Multipurpose Management of Bogor Botanic Garden, Indonesia. Proceeding of Ecotourism Research Symposium: Ecotourism for Global Peace* (book chapter). Seoul (KR): Marubooks Publishing Co.
- Ekayani M, Nuva, Yasmin R, Sinaga F, Maaruf L. 2014. Wisata alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: solusi kepentingan ekologi dan ekonomi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 19(1):29-37.
- Engel S, Pagiola S, Wunder S. 2008. Designing payments for environmental services in theory and practice: an overview of the issues. *Ecological Economics*. 65:663-674.
- Ernawati NM. 2010. Tingkat kesiapan Desa Tihingan-Klungkung, Bali sebagai tempat wisata berbasis masyarakat. *Analisis Pariwisata*. 10(1):1-8.
- Fadilah AI. 2016. Manfaat ekonomi dan analisis stakeholder wisata alam Gunung Pananjakan 1 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Fauzi A. 2014. *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Bogor (ID): IPB Pr.
- Halim LF. 2016. Pengelolaan dan potensi ekowisata di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Agrika*. 10(2):99-109.
- Hasanah S. 2018. Perilaku konservasi pelaku usaha dan tenaga kerja di Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu (TWAGTP) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Hijrianti E, Mardiana R. 2014. Community based ecotourism influence the condition of ecology, social, and economic Batusuhunan village, Sukabumi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 2(3):146-159.
- Istiqomah A, Ekayani M, Nuva, Pramudita D, Idris B, Osmaleli. 2019. Manfaat ekonomi wisata alam pada pemenuhan pengeluaran rumah tangga dan konservasi Taman Nasional. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 24(3):280-288
- Jatmiko YA. 2017. Pengaruh karakteristik masyarakat terhadap partisipasi pemeliharaan saluran lingkungan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 13(2):257-268.
- Kalantari, Asadi. 2010. Designing a structural model for explaining environmental attitude and behavior of urban residents (case of Tehran). *Scientific Journal*. Karaj (IR): University of Tehran.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lindberg K. 1991. *Policies for Maximizing Nature Tourism's Ecological and Economic Benefits*. Washington (USA): World Resources Institute.
- Martina S. 2014. Dampak pengelolaan taman wisata alam kawah putih terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pariwisata*. 1(2):81-89.
- Mogaka H, Simons G, Turpie L, Emerton, Karanja F. 2001. *Economic Aspects of Community Involvement in Sustainability Forest Management in Eastern and Southern Africa*. Nairobi (KE): IUCN Eastern Africa Regional Office.
- Munawaroh. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Taman wisata alam Gunung Merbabu. *Jurnal Student UNY*. 1(1):374-389.
- Narsuka DR, Sujali. 2009. Persepsi dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan TNGM. *Jurnal Majalah Geografi Indonesia*. 23(2):90-108.
- [PHPA] Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. 1996. *Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Wisata Alam dan Hutan Lindung*. Bogor (ID): Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
- [PT. GRPP] PT. Graha Rani Putra Persada. 2017. *Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)*. Bandung (ID): PT. GRPP.
- Pasape L, Anderson W, Lindi G. 2013. Towards sustainable ecotourism through stakeholder

- collaborations in Tanzania. *Journal of Tourism Research & Hospitality*. 2(1):1-14.
- Rais S, Ruchiat Y, Hideta T, Sartono A, Rukan D, Sugandi E, Kusnadi, Sutaryono. 2007. *Kawasan Konservasi Indonesia Tahun 2006*. Bogor (ID): Sub Direktorat Informasi Konservasi Alam.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran dalam Penelitian*. Bandung (ID): CV Alfabeta.
- Satria DJ. 2017. Manfaat ekonomi wisata dan pemanfaatan sumberdaya air di Kawasan Taman wisata alam Gunung Halimun Salak [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Smith M, Robinson M. 2006. *Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (Re)presentation*. Canada (UK): An imprint of Multilingual Matters Ltd.
- Sundari HA, Zulfanita, Utami DP. 2012. Kontribusi usahatani ubi jalar (*Ipomea batatas* L) terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Ukirsari, Kecamatan Grabah, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Surya Agritama*. 1(2):34-45.
- Suprayitno. 2008. *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam*. Bogor (ID): Departemen Kehutanan Pusat DIKLAT Kehutanan.
- Supriatna J. 2014. *Beriwisata Alam di Taman wisata alam*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suparmoko. 2008. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta (ID): BPFE.
- Tiga MRM, Putri EIK, Ekayani M. 2019. Persepsi masyarakat Desa Katikuwai dan Desa Praing Kareha terhadap pengembangan ekowisata di Taman Nasional Matalawa NTT. *Jurnal Sosiologi Pedesaan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 7(1):34-40.
- Yoeti OA. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta (ID): Kompas